

IMPLEMENTASI BANTUAN SISWA MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM-SD) DI SDN CANDINEGORO KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

Kurnia Oktavia Sujatmiko

S1 Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

kurniaoktaviasujatmiko@gmail.com

Weni Rosdiana, S.Sos.,M.AP.

DIII Administrasi Negara

S1 Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

wena_23979@yahoo.com

Abstrak

Program BSM adalah bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan kepada siswa miskin. Target group program BSM adalah orang tua siswa penerima KPS, PKH, dan siswa yatim piatu. Tujuan program BSM adalah membantu siswa dari keluarga tidak mampu. Permasalahan implementasi program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo adalah keterlambatan pencairan dana BSM, kurangnya sosialisasi antar pihak pelaksana, dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang tua siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksana BSM di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, UPTD Pendidikan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Kepala desa Candinegoro, SDN Candinegoro, siswa dan wali murid penerima BSM. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan, ukuran belum sepenuhnya tercapai, karena masih ada siswa miskin yang sudah menerima BSM. Sumberdaya manusia sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, sumberdaya dana mengalami keterlambatan pencairan dana BSM, dan sumberdaya waktu ada masalah dalam pendistribusian dana BSM. Karakteristik agen pelaksana sudah sesuai dengan tupoksi. Sikap atau kecenderungan para pelaksana sangat ramah. Intensitas komunikasi antarorganisasi dan aktifitas pelaksana dilakukan melalui surat dan telepon, dan kondisi sosial adanya dukungan dan partisipasi dari siswa dan orang tua cukup baik, kondisi ekonomi yang rendah dan elite politik ditingkat desa yang mendukung keberhasilan program tersebut. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Tim Manajemen BSM Pusat diharapkan mau berkoordinasi dengan Pemerintah daerah dan bank BRI supaya tidak lagi terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana, meningkatkan kesadaran orang tua siswa agar tidak menyalahgunakan dana BSM, dan pihak sekolah memprioritaskan anak yang tidak mampu.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Siswa Miskin

Abstract

BSM is a program of government assistance in the form of a sum of money given to poor student. BSM program target group is the recipient parent KPS, PKH, and orphan student. The purpose of the BSM program is helping students from poor families to obtain educational services. BSM implementation issues in SDN Candinegoro Wonoayu District of Sidoarjo regency is BSM disbursement delays, lack of socialization among the implementers, and abuse committed by parents. The purpose of this research is to investigate the implementation of the program Help Poor Students in SDN Candinegoro Wonoayu District of Sidoarjo. This study used a qualitative descriptive approach. Research subjects in this study is implementing BSM in Sidoarjo District Education Office, District of Wonoayu UPTD Sidoarjo district, village head Candinegoro, SDN Candinegoro, students and parents BSM receiver. Data collection techniques used were interviews, observation, documentation and triangulation. Qualitative data analysis techniques. The results showed variable size and purpose of the policy, the size has not been fully achieved, because there is still a poor student who had received the BSM. Human Resources in conformity with the required criteria, resourced is disbursement of funds has been delayed BSM, there is a problem of time and resources in the distribution of funds BSM. Characteristics are in accordance with The intensity of communication between organizations and implementing activities conducted by mail

and phone, and social conditions of the support and participation of the students and parents well enough, poor economic conditions and political elite at the village level that supports the success of these programs. The advice given in this study is expected to center BSM Management Team would coordinate with local governments and partner banks that are no longer any delay in disbursement of funds, Raise awareness of parents so as not to misuse the funds of BSM, the school prioritize children who are not capable of.

Keywords: Implementation of policy, assistance to poor.

PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan di bidang pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, ataupun masyarakat penyandang cacat. (<http://provinsijatim.ac.id>)

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung (<http://provinsijatim.ac.id>). Maka dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan mutu pendidikan, serta menekan putus sekolah pemerintah memperluas akses pendidikan dasar melalui beberapa program yang diantaranya adalah BOS, PKH, dan BSM.

Bantuan Siswa Miskin termasuk dalam Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang dijelaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2012 tentang Langkah-Langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2012 menjelaskan tentang anggaran kompensasi BBM meliputi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan, penyesuaian besaran bantuan Program Keluarga Harapan, bantuan dan tambahan subsidi bidang transportasi, penyesuaian besaran dan perluasan cakupan bantuan siswa miskin, dan penyesuaian jumlah raskin (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2012 tentang Langkah-Langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012).

BSM adalah salah satu dari program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Program BSM berupa bantuan sejumlah uang tunai sebesar 425 ribu per tahun yang diberikan secara langsung kepada siswa sekolah dasar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Program BSM bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswa miskin dalam memenuhi biaya kebutuhannya di bidang pendidikan. Program BSM juga dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa yaitu Pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan tas), biaya transportasi siswa ke sekolah, uang saku siswa untuk

sekolah sehingga dapat meringkankan beban orang tua siswa (Kemdikbud, 2013).

Sasaran atau Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah siswa yang orang tuanya penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), siswa penerima Kartu Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin Khusus untuk SD dan SMP, orang tua siswa terdaftar sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, siswa yatim, piatu, atau yatim piatu, siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik, korban PKH dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) (Kemendikbud, 2013).

Implementasi program Bantuan Siswa Miskin di Indonesia ternyata belum bisa dikatakan berhasil, karena permasalahan baru terjadi pada saat setelah disalurkannya Bantuan Siswa Miskin (BSM) ke seluruh Indonesia yaitu terkait rendahnya serapan dana BSM kepada masyarakat. Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah harus bekerja keras untuk mensosialisasikan program BSM, karena permasalahan yang terjadi dapat menghambat pencapaian keberhasilan program BSM.

Pelaksanaan program BSM dilaksanakan di seluruh provinsi Jawa Timur, dan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang melaksanakan Program BSM yaitu Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi program BSM di Kabupaten Sidoarjo mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Terdapat salah satu sekolah dasar di Kabupaten Sidoarjo yang melaksanakan program BSM yaitu SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang memiliki masyarakat miskin yang jumlahnya paling banyak diantara dusun yang lainnya yaitu 128 Kepala Keluarga (KK) yang termasuk dalam keluarga miskin.

Implementasi program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mulai dijalankan sejak tahun 2009. Jumlah siswa yang mendapat Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami perubahan di setiap tahun. Hal tersebut dikarenakan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat semakin bertambah.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan banyak permasalahan dalam pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin juga di alami di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Permasalahannya yaitu terjadi penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh orang tua siswa dalam program Bantuan Siswa Miskin. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa

dana yang diberikan belum tepat sasaran, adanya kendala dalam sumberdaya dana. Pencairan dana yang disalurkan oleh pemerintah terkadang tidak tepat waktu juga dapat menghambat pelaksanaan program BSM, dan rendahnya komunikasi antara para implementor dapat menghambat pelaksanaan program BSM.

Melihat pemaparan diatas, salah satu model implementasi yang tepat untuk menggambarkan fenomena implementasi yang ada dilapangan terkait dalam Implementasi Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yaitu menggunakan model pendekatan *top down* yang dirumuskan Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang disebut *A Model of The Policy Implementation*. Dimana model ini menekankan enam faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Enam variabel atau faktor antara lain meliputi variabel atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang sudah dicapai tentang "**Implementasi Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di SD Negeri Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo**".

1. Kebijakan Publik

kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat mengatur dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi, hal ini sejalan dengan pendapat *Easton*(Islamy,2002:19) bahwa kebijakan mengandung nilai paksaan yang secara sah dapat dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Solichin (2012:135) sesuai kamus Webster merumuskan *to implement* (mengimplementasikan) yang berarti *provide the means for carrying out*(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)dan *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)termasuk tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

b. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Unsur-unsur dalam implementasi kebijakan merupakan faktor penting. Dengan kata lain dalam

mengimplementasikan kebijakan publik harus ada unsur-unsur sebagai sarana sehingga dihasilkan implementasi yang efektif. Unsur-unsur penting tersebut menurut Abdullah dan Smith (Tachjan, 2006:26) yaitu unsur pelaksana (implementor), adanya program yang dilaksanakan dan target group.

3. Model Implementasi

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu Tachjan (2006:36-37). Variabel-variabel tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik agen pelaksana
- d. sikap kecenderungan (disposisi) para pelaksana
- e. komunikasi antarorganisasi
- f. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mengambil fokus dari Keberhasilan implementasi menurut teori model Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn melalui enam variabel yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana komunikasi antar organisasi, Sikap kecenderungan (disposisi) para pelaksana, Kondisi sosial, ekonomi, politik.

Penelitian ini dilakukan Lokasi penelitian ini yaitu di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Adapun fokus penelitian ini adalah Implementasi program BSM-SD di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik model Van Metter dan Carl Van Horn.

Data primer pada penelitian ini juga diperoleh melalui wawancara atau interview Untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian maka teknik yang digunakan adalah Purposive sampling, yaitu memilih narasumber dipandang sebagai pihak yang mengetahui tentang implementasi car free day. Adapun informan yang digunakan sebagai narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Ibu Wahyu Irnaningsih, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Candinegoro selaku penanggungjawab program Bantuan Siswa Miskin.
- b) Hj. Sumiarni, S.Pdi selaku Bendahara program BSM di SDN Candinegoro selaku pengelola dana khususnya dana BSM
- c) Ibu Dini selaku guru atau para staff SDN selaku pemberi informasi mengenai sistem atau prosedur yang berlaku dalam program BSM.

- d) Ibu Indahyani selaku orang tua siswa miskin sebagai pihak penerima program BSM.
- e) Elfito selaku Siswa sebagai penerima BSM.
- f) Ibu Ervin Harahap selaku pelaksana BSM-SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Dan juga peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik pelaksanaan car free day, hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat mengenai program car free day yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik snowball sampling. Menurut Sugiyono (2013:54) snowball sampling merupakan teknik pengambil informasi dari sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan logika induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Model tahapan analisis ini adalah sebagai berikut (Bungin, 2007 : 147) :

- a. Melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial dan melakukan identifikasi, revisi-revisi, dan pengecekan ulang terhadap data yang ada.
- b. Melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh.
- c. Menelusuri dan menjelaskan kategorisasi.
- d. Menjelaskan hubungan-hubungan dengan kategorisasi.
- e. Menarik kesimpulan-kesimpulan umum.
- f. Membangun atau menjelaskan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi BSM-SD dalam penelitian ini dapat dikaji berdasarkan beberapa variabel menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap kecenderungan (disposisi) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi, Kondisi sosial, ekonomi, politik.

Ukuran dan tujuan kebijakan menjadi hal pertama yang harus diketahui untuk menjelaskan bagaimana implementasi suatu program dilaksanakan. Tujuan kebijakan menjadi penting karena menyangkut alasan mengapa kebijakan tersebut dikeluarkan dan untuk apa kebijakan tersebut dikeluarkan. Tanpa sebuah tujuan dalam melaksanakan kebijakan, maka akan susah untuk menentukan hasil dan mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

Pelaksanaan program BSM bertujuan untuk:

- a) Menghilangkan halangan siswa miskin untuk akses pelayanan pendidikan.
- b) Mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali
- c) Membantu siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pembelajaran.
- d) Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, dan pendidikan menengah universal.

Tujuan dibuat dan tercantum dalam sebuah kebijakan agar dapat digunakan untuk melihat keberhasilan kebijakan tersebut. Cara untuk melihat keberhasilan dalam sebuah kebijakan diperlukan sebuah ukuran, standart atau target untuk melihat apakah pelaksanaan kebijakan tersebut menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan awal. SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo memberikan atau menetapkan ukuran keberhasilan kebijakan dengan membuat target-target pencapaian, seperti mengusulkan siswa penerima BSM sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian tujuan program BSM tersebut sudah bisa dikatakan berhasil ketika siswa miskin sudah mendapat BSM. Akan tetapi tujuan dari program BSM juga bisa dikatakan belum berhasil ketika siswa yang tergolong kurang mampu belum mendapatkan dana BSM, karena tidak semua siswa kurang mampu di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mendapatkan dana BSM.

SDN Candinegoro mempunyai kendala dalam penyaluran BSM yaitu dalam menetapkan usulan calon penerima BSM yang kurang tepat sasaran, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya implementasi program BSM.

Implementasi program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mempunyai ukuran tertentu agar program BSM bisa dicapai sesuai dengan target. Target atau sasaran dalam program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yaitu siswa yang berasal dari orang tua kurang mampu, orang tua yang sakit, siswa yang termasuk anak yatim, dan orang tua siswa mempunyai Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sebagian besar wali muridnya mengusulkan BSM dengan surat keterangan tidak mampu dari desa, karena hanya beberapa saja yang mempunyai Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Hal tersebut bisa dibuktikan dari tabel berikut:

Tabel 4.5
Jumlah wali murid yang memiliki KPS

No	kelas	Jumlah orang tua yang memiliki KPS
1	I	3
2	II	-
3	III	2
4	IV	1
5	V	-
6	VI	9

Untuk ukuran suatu kebijakan program BSM, SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mempunyai ukuran tersendiri agar pelaksanaan program BSM berjalan dengan baik. Ukuran yang dipakai oleh SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo untuk pelaksanaan program BSM yaitu pihak sekolah berusaha agar dana BSM bisa tersalur kepada siswa yang benar-benar berhak menerima dana BSM (tepat sasaran) dan dana BSM tersebut benar-benar dipakai untuk keperluan sekolah seperti yang dijelaskan dalam buku pedoman BSM, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, uang saku, dan untuk biaya kursus atau les tambahan.

Ukuran kebijakan pelaksanaan program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, dilihat dari target-target atau sasaran yang telah ditentukan, dan ketika target yang ditentukan dapat dicapai maka implementasi kebijakan tentang pelaksanaan program BSM ini dapat dikatakan berhasil dan begitu sebaliknya. Dalam hal ini, ukuran yang dimiliki oleh SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya tercapai, dimana masih ada orang tua siswa yang menggunakan dana BSM untuk keperluan lain, misalnya keperluan rumah tangga.

Pada variabel sumber-sumber kebijakan, sumber kebijakan yang dimaksud adalah sumberdaya dalam pelaksanaan program. Karena pemanfaatan sumberdaya dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Agustino (2006) keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

Menurut Agustino (2008:142) sumber daya manusia juga berkaitan dengan kapasitas dan integritas yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut selaku pelaksana kebijakan. Sumberdaya manusia di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana.

Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh SDN Candinegoro bisa dikatakan cukup untuk melaksanakan program BSM. Dalam pelaksanaan program BSM, SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo memiliki ketersediaan tenaga untuk melaksanakan program BSM. Jumlah guru di SDN Candinegoro sebanyak 11 orang dan 4 orang guru terpilih sebagai pelaksana BSM dimana 4 guru tersebut mempunyai tanggung jawab masing-masing, yaitu Ibu Wahyu selaku kepala sekolah sebagai penanggung jawab program BSM, Ibu Sumiarni selaku bendahara BSM, Ibu Dini selaku guru dan bertugas sebagai melengkapi data siswa penerima BSM, dan Ibu Amarullah selaku guru yang bertugas sebagai memilah-milah siswa yang berhak mendapat BSM.

Pelaksanaan program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo bisa berjalan dengan baik ketika pelaksana program tersebut benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti halnya kepala sekolah dalam pelaksanaan program BSM adalah sebagai penanggung jawab program, para guru sebagai pelaksana program misalnya sebagai bendahara BSM, bertugas dalam memilah calon siswa penerima BSM, dan mendata siswa yang mendapat BSM. Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang tugas masing-

masing guru SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 4.5
Tupoksi pelaksana BSM

No	Elemen	Tupoksi
1	kepala sekolah	penanggung jawab
2	Bendahara	memantau atau mengelolah dana BSM
3	Guru	memilah dan melengkapi data siswa

Sumber: data diolah

Pada tabel diatas menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab pihak sekolah yang terlibat dalam pelaksanaan program BSM, yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab program BSM, Bendahara sebagai pengelola dana BSM misalnya saja mencatat siapa saja yang mendapat dana BSM, mencatat pemasukan dan pengeluaran dana BSM, dan guru yang bertugas untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapat BSM, kemudian setelah memilah-milah siswa penerima BSM, guru harus melengkapi data siswa penerima BSM di lembar rekapitulasi dari UPTD Wonoayu.

Didalam penentuan agen pelaksana program kebijakan pasti harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, sehingga dengan adanya kriteria-kriteria tersebut pemilihan pelaksana program BSM akan maksimal. Dalam pemilihan agen pelaksana yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang dibutuhkan maka pelaksanaan program kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Hal tersebut akan berdampak pada berhasil atau tidaknya suatu kebijakan program.

Pelaksana program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dipilih langsung oleh kepala sekolah SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan BSM berharap agar mencapai keberhasilan. Dalam pemilihan pelaksana program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sudah bisa dikatakan sesuai dengan kriteria-kriteria yang di butuhkan. Misalnya saja guru yang dipilih sudah sesuai dengan keahlian atau kemampuan yang diinginkan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Guru yang dipilih sebagai pelaksana BSM sangat cocok dan mampu menjalankan tanggung jawab dan tugasnya sebagai pelaksana BSM.

Agen pelaksana dalam suatu kebijakan sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu kebijakan. Didalam pelaksanaan suatu program para agen pelaksana pasti mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Suatu program bisa dikatakan berhasil ketika agen pelaksana yang terlibat dalam suatu program tersebut mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Para pelaksana BSM di SDN

Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya sudah berusaha melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana program, agen pelaksana di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mengalami permasalahan sehingga berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan BSM. Permasalahan tersebut yaitu masih ada orang tua atau penerima BSM yang menyalahgunakan BSM untuk keperluan lain diluar keperluan sekolah.

Menurut Agustino (2008:142) menyatakan bahwa mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Tidak hanya sumberdaya manusia yang penting dalam suatu kebijakan. Sumberdaya yang tidak kalah pentingnya adalah sumberdaya finansial. Sumberdaya finansial untuk melaksanakan program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo berasal dari dana APBN yang akan dikeluarkan untuk siswa kurang mampu setiap tahunnya. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk:

- 1) Pembelian buku dan alat tulis sekolah;
- 2) Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll)

Pada tahun 2013 setiap siswa yang terdaftar dalam program BSM menerima 425ribu rupiah pertahun. Dana tersebut dimanfaatkan para siswa penerima BSM untuk membeli keperluan siswa di sekolah, seperti membeli tas, membeli seragam, sepatu dan lain-lain.

sumber daya waktu juga merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya waktu menyangkut ketersediaan pelaksana dalam menjaga keberlangsungan kebijakan. Ketika ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya finansial telah terpenuhi, tanpa adanya waktu untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut tidak berjalan dan terhenti begitu saja.

Mengenai sumberdaya waktu dalam implementasi program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yaitu telah ditetapkan jangka waktu pencairan BSM selama 3 bulan setelah batas waktu pencairan BSM. Jika siswa tidak mengambil uang setelah 3 bulan, maka rekening akan di blokir dan uang akan dikembalikan ke kas negara.

Akan tetapi SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tidak pernah mengalami keterlambatan dalam pengambilan dana BSM, melainkan mengalami permasalahan dalam keterlambatan dana BSM yang turunnya telat. Permasalahan tersebut sangat merugikan siswa yang sangat memerlukan dana BSM.

Ketika dana BSM mengalami keterlambatan, hal tersebut sangat merugikan siswa yang sangat membutuhkan dana BSM untuk keperluan sekolah. Akan tetapi para pelaksana BSM di SDN Candinegoro hanya bisa menunggu sampai dana tersebut cair, karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh SDN Candinegoro untuk menutupi dana BSM yang belum cair.

Menurut Lilik (61:2005) mengatakan bahwa karakteristik agen pelaksana meliputi struktur birokratik sebagai karakteristik, norma dan pola-pola yang berhubungan di dalam lembaga eksekutif yang berhubungan secara potensial atau aktual apakah mereka melakukan dengan cara kebijakan.

Pelaksanaan program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo melibatkan setidaknya beberapa agen pelaksana yaitu Dinas Pendidikan Sidoarjo, UPTD Pendidikan Wonoayu, dan SDN Candinegoro.

Dalam penentuan agen pelaksana, SDN Candinegoro memiliki kriteria-kriteria yang harus dipertimbangkan agar implementasi program BSM dapat berjalan dengan lancar. Para agen pelaksana program BSM harus benar-benar mengerti betul tentang keadaan tempat tinggal siswa dan kondisi siswa, sehingga dalam penentuan siswa yang berhak mendapat BSM bisa maksimal. Adanya kriteria-kriteria yang telah digunakan untuk menentukan agen pelaksana program BSM SDN Candinegoro dirasa sudah efektif untuk pelaksanaan program BSM. Dimana kriteria-kriteria yang dipakai oleh SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sangat membantu dalam penentuan calon penerima BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 4 orang guru yang sangat berperan penting dalam pencapaian keberhasilan program BSM terutama dalam penentuan calon penerima BSM.

Suatu implementasi kebijakan tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan dalam mencapai puncak keberhasilan. Hal tersebut juga terjadi dalam pelaksanaan program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Para agen pelaksana di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mempunyai kendala dalam pelaksanaan program BSM yaitu dalam penetapan siswa penerima BSM. Terdapat orang tua siswa yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sebagai penerima BSM.

Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sikap dari agen pelaksana. Sikap dari agen pelaksana akan menunjukkan bagaimana respon dari pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Para agen pelaksana bisa memberikan sikap penerimaan atau penolakan. Menurut Agustino (2006), sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal tersebut dapat muncul ketika bentuk kebijakan yang dilaksanakan adalah kebijakan *top down*. Menurut widodo (2007:105) Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan antara lain terdiri atas pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan, apakah arah respon implementator pada kebijakan yang dilaksanakan menerima atau menolak.

Pelaksanaan program BSM di SDN Candinegoro mendapat respon yang positif dari guru dan siswa SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya program BSM siswa yang kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan sekolah. Sikap dari agen

pelaksana program BSM akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya program BSM. Para agen pelaksana harus mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaksana program BSM. Para agen pelaksana program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam penentuan siswa miskin berusaha untuk menyamaratakan dan tidak memihak siswa satu dan siswa yang lainnya.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik (Agustino:2006). Komunikasi merupakan salah satu mekanisme yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Komunikasi dapat berupa informasi yang disampaikan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaksana kebijakan agar para pelaksana kebijakan dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran.

Pelaksanaan program BSM melibatkan banyak pihak, baik dari dalam organisasi maupun antarganasasi. Organisasi disini adalah SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Untuk menjelaskan secara jelas pada variabel ini, perlu pemisahan pelaksana tugas antara beberapa pihak yang terlibat. Dalam hal ini, ada dua pihak yang terbagi yakni pihak internal SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan eksternal SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui jalur komunikasi antar pihak dan bentuk koordinasi apa yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat pelaksanaan program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Pihak internal SDN Candinegoro kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo merupakan yang terlibat langsung seperti kepala sekolah, para guru, bendahara BSM, dan siswa. Sedangkan kelompok eksternal SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo adalah para orang tua siswa penerima BSM.

Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yaitu berawal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo menyampaikan segala hal mengenai program BSM kepada SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mengingat kebijakan ini merupakan kebijakan *top-down* yaitu kebijakan yang dibuat dan diputuskan dari atas yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan dilaksanakan oleh birokrat-birokrat yang ada dibawahnya yaitu SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Pelaksanaan program BSM akan berhasil ketika para agen pelaksana program BSM mampu bersosialisasi dengan antar pihak pelaksana yang lainnya seperti Dinas pendidikan dan UPTD pendidikan Kecamatan Wonoayu. Para pelaksana harus memahami tentang program BSM. Para pelaksana di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo harus mensosialisasikan program BSM tersebut kepada siswa dan wali murid, sehingga mereka dapat melemahami tentang program BSM.

Pemahaman yang dimiliki oleh pihak sekolah SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sangat penting dalam pelaksanaan program BSM, karena dengan adanya pemahaman tersebut pihak sekolah yang bertugas melaksanakan program BSM mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dengan adanya pemahaman yang dimiliki oleh para pelaksana, para pelaksana program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo akan mampu menjelaskan kepada siswa dan wali murid melalui rapat wali murid.

Jalanan koordinasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan program BSM sampai saat ini tidak ada kendala. Karena kami sebagai pelaksana program BSM sudah mempunyai tugas masing-masing dalam pelaksanaan program BSM. Walaupun pihak esktenal (DISPENDIK dan UPTD) tidak pernah mensosialisasikan secara langsung tentang program BSM ke pihak sekolah. Hanya saja ketika DISPENDIK mengirimkan surat mengenai program BSM, pihak UPTD langsung menginformasikan lewat telepon ataupun surat kepada masing-masing sekolah. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, mengharuskan para guru di SDN Candinegoro sebagai pelaksana BSM harus mencari informasi sendiri tentang BSM.

Van metter dan Van Horn memberikan tujuh variabel dalam implementasi kebijakan. Salah satu dari tujuh variabel tersebut merupakan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dalam hal ini, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Lingkungan atau keadaan sasaran pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap hasil kebijakan yang akan diraih. Agustino (2006) mengatakan bahwa interaksi antara lingkungan kebijakan dan kegiatan kebijakan publik itu sendiri memiliki hubungan yang saling berpengaruh.

Dari segi ekonomi, keadaan perekonomian BSM dapat dilihat dari pendidikan dan mata pencaharian orang tua siswa, dimana pendidikan terakhir orang tua siswa sebagian besar adalah SMA.

Tabel 4.6
Jenis pendidikan wali murid

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Tidak sekolah	9
2	putus SD	4
3	SD	7
4	SMP	11
5	SMA	14
6	D3/S1	1

Sumber: dokumen SDN Candinegoro, 2014.

Mata pencaharian siswa penerima BSM adalah sebagai karyawan swasta, pedagang kecil, wiraswasta, buruh petani dan ada juga yang menjadi pengangguran.

Tabel 4.7
Jenis Pekerjaan wali murid

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan Swasta	22
2	Wiraswasta	10
3	Buruh	5
4	Petani	1
5	pedagang kecil	5
6	tidak bekerja	3

Sumber: dokumen SDN Candinegoro, 2014.

Dilihat pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas orang tua siswa penerima BSM yaitu bekerja sebagai karyawan swasta yang sebagian besar berpenghasilan 500.000-999.999-, perbulan.

Tabel 4.8
Penghasilan wali murid

No	Penghasilan Perbulan	Jumlah
1	< 500.000,-	6 orang
2	500.000-999.999,-	30 orang
3	1.000.000-1.999.999,-	9 orang
4	5.000.000-20.000.000,-	1 orang

Sumber: dokumen SDN Candinegoro, 2014.

Minimnya pendapatan yang diperoleh orang tua siswa, mengakibatkan siswa sulit untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Mengingat kebutuhan hidup sekarang yang semakin lama semakin mahal, orang tua siswa yang berpenghasilan minim mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Ketidak seimbangannya antara mahalnya kebutuhan hidup dengan pendapatan orang tua siswa menjadi pemicu utama siswa sulit untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Melihat penghasilan orang tua siswa perbulan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja.

Berbicara mengenai lingkungan sosial berarti berbicara mengenai keadaan sosial orang tua siswa atau siswa di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Sidoarjo. Para orang tua dan siswa sangat mendukung adanya program BSM tersebut. Karena orang tua siswa dan siswa merasa bahwa dengan adanya program BSM tersebut dapat membantu meringankan beban orang tua untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Dan dengan adanya dukungan dan partisipasi dari orang tua siswa dan siswa terhadap program BSM tersebut, maka program BSM dapat berjalan dengan baik. Mengingat partisipasi dari orang tua siswa penerima BSM sangat mempengaruhi berhasil tidaknya program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Unsur politik dalam pelaksanaan program BSM saat ini sangat mempengaruhi keberhasilan program BSM. Dalam pelaksanaan program BSM, elite politik ditingkat desa mendukung supaya anak-anak dapat melengkapi kebutuhan sekolahnya, sehingga tidak mempersulit pengurusan kelengkapan persyaratan menerima BSM.

Namun, ada sebagian wali murid yang melakukan kecurangan yaitu dengan mengusulkan sebagai penerima

BSM padahal wali murid tersebut tergolong mampu. Tidak hanya itu saja, ada juga wali murid yang memanfaatkan dana BSM untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk keperluan sekolah anaknya.

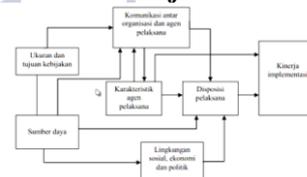
Pembahasan

Untuk memperoleh penjelasan baik atau buruknya Kebijakan merupakan pedoman untuk bertindak, menurut Carl Friedrich dalam wahab (2002:3) kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu sekolah di Kabupaten Sidoarjo yang melaksanakan program BSM adalah SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo pertama kali mengimplementasikan program BSM pada tahun 2009. Sebelum menerima dana Bantuan Siswa Miskin setiap siswa SD Negeri Candinegoro yang kurang mampu hanya mengandalkan dana BOS agar mereka dapat bersekolah. Sehingga dengan adanya bantuan dana BSM tersebut dirasa sangat membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya, misalnya saja untuk membeli peralatan sekolah seperti tas, buku, sepatu dan lain-lain.

Menurut Tachjan (2006:26) unsur-unsur dari kebijakan yang harus ada yaitu unsur pelaksana, program dan sasaran, dalam pelaksanaan program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo unsur-unsur pelaksana yaitu SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, unsur program yaitu program BSM dan target sasaran yaitu siswa miskin. Ketika unsur-unsur implementasi kebijakan telah disediakan, maka kegiatan selanjutnya yaitu mengimplementasikan kebijakan. Enam variabel dalam implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan lingkungan merupakan konsep dari model implementasi Van Metter Van Horn.

Gambar 4.10

Model implementasi kebijakan Van Metter Van Horn



Sumber: Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:144)

Kegiatan implementasi BSM diperlukan panduan untuk menilai serta mengamati secara jelas bagaimana pelaksanaan program. Panduan tersebut berupa teori dalam penelitian ini menggunakan enam variabel implementasi kebijakan yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana,

lingkungan sosial, ekonomi dan politik merupakan konsep model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Dimana variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang terkait antara variabel yang satu dengan yang lain, hubungan antar variabel tersebut digunakan untuk menganalisis suatu implementasi kebijakan publik. Implementasi program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dianalisis berdasarkan hubungan keenam variabel yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn.

Ukuran dan tujuan kebijakan pada dasarnya apa yang hendak ingin dicapai oleh kebijakan. Baik yang berwujud atau tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang dijalankan.

Program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo telah dirancang sedemikian rupa oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan segala bentuk dan tujuannya. Model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan merupakan salah satu variabel yang diurai untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebuah kebijakan. Untuk melihat apakah kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak, pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan telah mencanangkan kebijakan program BSM dengan segala petunjuk teknis, maksud dan tujuan, dan untuk mengukur tujuan-tujuan yang dicanangkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan target-target untuk mengukur tujuan kebijakan, apakah kebijakan tersebut sudah berhasil atau tidak, dan ukuran tujuan kebijakan dengan cara menetapkan target dianggap cara yang efektif, karena ukuran tersebut terlihat jelas dan berupa data sehingga tidak bisa dibantah dan membuat data tersebut valid untuk melihat keberhasilan kebijakan program BSM tersebut.

Untuk ukuran pada implementasi program BSM, pihak pelaksana di SDN Candinegoro berusaha agar dana BSM tersalurkan kepada yang berhak menerima dan uang yang didapat benar-benar digunakan untuk kebutuhan sekolah. Sehingga sekolah SDN Candinegoro dalam program BSM mempunyai tujuan tertentu agar program BSM dapat berjalan dengan baik. Berikut merupakan tujuan program BSM:

- a) Menghilangkan halangan siswa miskin untuk akses pelayanan pendidikan.
- b) Mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali
- c) Membantu siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pembelajaran.
- d) Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, dan pendidikan menengah universal.

Akan tetapi dalam pencapaian tujuan dari program BSM tersebut sudah bisa dikatakan berhasil untuk siswa miskin yang sudah menerima BSM, namun tujuan

program BSM belum bisa dikatakan berhasil untuk siswa miskin yang belum menerima BSM.

Dalam pencapaian tujuan program BSM tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan tujuan program BSM. Permasalahan yang terjadi di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo adalah dalam penetapan usulan siswa penerima BSM yang kurang tepat sasaran.

Menurut widodo (2007:98) menyatakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Sehingga efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, karena sumber daya manusia sebagai implementator kebijakan. Untuk mengimplementasikan kebijakan dibutuhkan jumlah sumber daya manusia yang memenuhi serta kualitas sumber daya manusia yang baik.

Sumberdaya yang terkait dalam implementasi program BSM ini adalah sumberdaya manusia. Untuk sumberdaya manusia pada implementasi program BSM di SDN Candinegoro terdapat 4 guru yang terlibat dalam pelaksanaan program BSM. 4 (empat) guru yang telah dipilih dalam pelaksana program tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan yaitu sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. guru yang bertugas menentukan siswa adalah guru yang berdomisili di desa Candinegoro dikarenakan guru tersebut mengetahui betul tentang kondisi siswa, sehingga dengan harapan agar dalam pemilihan siswa bisa tepat sasaran.

Sebagai pelaksana program BSM, SDN Candinegoro harus menjalankan tugas dan tanggung jawab sekolah pelaksana program BSM yang antara lain: mendata siswa calon penerima BSM sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, membuat daftar usulan calon penerima BSM perkelas dengan gender sesuai dengan urutan prioritas, menerbitkan surat keputusan (SK) Kepala Sekolah tentang usulan calon siswa penerima BSM, membatalkan penerima BSM yang tidak sesuai dengan kriteria, menyampaikan laporan realisasi penerimaan dana BSM ke DISPENDIK Kabupaten, memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap kehadiran siswa penerima BSM ke sekolah.

Sumberdaya anggaran (dana) pada implementasi program BSM diterima melalui rekening siswa yang dikirim langsung oleh tim manajemen BSM Pusat. Besar dana yang diterima oleh siswa penerima BSM yaitu sebesar 425ribu pertahun.

Mekanisme pengambilan dana BSM murid di SDN Candinegoro dilakukan oleh siswa atau orang tua siswa yang menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari masing-masing kelurahan, membawa foto copy KTP

orang tua siswa, dan foto copy raport untuk syarat pengambilan dana BSM di Bank.

Pemanfaatan dana BSM di SDN Candinegoro sudah dilakukan sesuai dengan pedoman BSM, pihak sekolah juga sudah berusaha semaksimal mungkin agar dana BSM tersebut benar-benar dipakai untuk keperluan sekolah. Akan tetapi ada wali murid yang berlaku curang, sehingga memungkinkan terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh wali murid.

Menurut Van Matter dan Van Horn menyatakan bahwa walaupun sumber daya manusia terpenyuluh dan giat bekerja, serta sumber daya keuangan berjalan dengan baik tetapi apabila terbentur oleh persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun akan menjadi penyebab bagian dari ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam pencairan dana BSM, ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh wali murid/ siswa yaitu jangka waktu pencairan BSM adalah selama 3 (tiga) bulan setelah batas waktu pencairan BSM. Jika siswa tidak mengambil uang setelah 3 (bulan), maka rekening akan diblokir dan uang akan dikembalikan ke kas Negara. Di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tidak mengalami masalah dalam pengambilan dana BSM. Akan tetapi dalam faktor sumberdaya anggaran ini terdapat hambatan, yakni seringkali pencairan dana BSM mengalami keterlambatan, sehingga dari pihak sekolah SDN Candinegoro hanya bisa menunggu sampai dananya cair. Hal tersebut dilakukan karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pihak sekolah SDN Candinegoro.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga di pengaruhi oleh karakteristik badan pelaksana kebijakan. Karakteristik badan pelaksana tersebut akan menentukan tentang bagaimana kebijakan akan dilaksanakan. Karakteristik agen pelaksana berkaitan dengan tugas dan spesialisasinya terhadap penyelenggaraan kebijakan. Spesialisasi dan tugas-tugas dari masing-masing agen pelaksana perlu diurai agar dapat menunjukkan sejauh mana karakteristik agen pelaksana dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Keberhasilan program BSM bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kegiatan. Pelaksana program BSM ini adalah DISPENDIK/UPTD dan sekolah SDN Candinegoro. Program BSM melibatkan langsung para guru di SDN Candinegoro yang terdiri dari 4 guru yang sudah sepenuhnya menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang telah diberikan.

Variabel lain yang juga mempengaruhi prestasi kebijakan secara langsung berdasarkan model implementasi kebijakan Van Matter dan Van Horn yaitu sikap dari pelaksana kebijakan. Sikap dari pelaksana merupakan variabel yang membahas sikap yang diberikan para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Sikap yang dimaksud adalah respon dari para pelaksana, apakah para pelaksana memberikan respon berupa dukungan atau keseriusan dan begitu sebaliknya dalam melaksanakan kebijakan. Walaupun dalam pelaksanaannya, di setiap organisasi telah memiliki tugas dan spesialisasi yang diatur dengan jelas, tetapi kemungkinan adanya patologi (penyakit) organisasi dapat dimungkinkan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan. Dan juga terkait dengan keinginan para

pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Terdapat beberapa kemungkinan bahwa organisasi pelaksana tidak serius dalam melaksanakan tugasnya, sehingga ketidakseriusan sebuah organisasi dalam melaksanakan tugasnya akan dapat terlihat dari minimnya produktivitas dan inovasi pelaksana serta target tidak dapat dicapai. Indikasi kemungkinan yang lain, dapat berasal dari procedural, yaitu pelaksana hanya melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur tanpa menghasilkan sebuah perubahan atau inovasi yang baru. sehingga kemungkinan adanya sikap dari pelaksana tersebut akan dapat menimbulkan ketidakberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Sikap atau kecenderungan (disposisi) para pelaksana dapat mempengaruhi efektifitas implementasi suatu kebijakan. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Implementor dalam hal ini adalah pihak pelaksana program BSM di SDN Candinegoro. Dari hasil observasi yang dilakukan, pihak pelaksana program BSM di SDN Candinegoro memberikan respon yang positif terhadap adanya program BSM dan berusaha melayani siswa dan orang tua siswa dengan sebaik-baiknya.

Program BSM sangat bermanfaat bagi siswa yang kurang mampu. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana komitmen pelaksana program BSM di SDN Candinegoro adalah dengan menganalisis melalui kemampuan dari pelaksana program dalam menghadapi kendala tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terdapat hambatan dalam implementasi program BSM selain pada faktor dana juga pada saat penentuan siswa calon penerima BSM. Penentuan siswa penerima BSM pihak sekolah sudah berusaha melaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada, akan tetapi terjadi permasalahan dalam penentuan siswa calon penerima BSM yaitu wali murid yang sudah terbilang mampu masih menginginkan anaknya mendapatkan dana BSM.

Faktor yang lainnya yang juga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program BSM adalah komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu sebaliknya. Komunikasi antar organisasi, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan kebijakan. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling mendukung antar institusi yang berkaitan dengan kebijakan sehingga kelompok sasaran mampu memahami dan bertanggung jawab atas kebijakan yang dijalankan.

Komunikasi sangat penting untuk mewujudkan implementasi yang efektif karena dengan adanya komunikasi yang jelas dari para pelaksana kebijakan mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang

harus dipersiapkan dan dilakukan sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Akan tetapi berdasarkan observasi awal dalam implementasi program BSM komunikasi yang dilakukan hanya melalui surat dan telepon, sehingga tidak adanya sosialisasi langsung dari DISPENDIK Sidoarjo dan UPTD Wonoayu. Pihak sekolah juga tidak menerima buku panduan BSM, hanya saja ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengirimkan surat ke DISPENDIK, terdapat lembaran yang berisi tentang petunjuk BSM sehingga informasi yang diberikan cukup terbatas. Dengan demikian, mengharuskan pihak sekolah mencari tahu sendiri mengenai program BSM.

Sosialisasi tidak hanya pada pihak pelaksana program saja, tapi dalam hal ini pihak SDN Candinegoro juga melakukan sosialisasi ke siswa dan wali murid. Untuk sosialisasi kepada wali murid dilakukan melalui rapat pertemuan wali murid dan kepala sekolah serta guru SDN Candinegoro.

Faktor yang terakhir yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan adalah lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Implementasi kebijakan tidak dapat terlepas dari suatu kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik pelaksana kebijakan. Kondisi ekonomi, sosial dan politik menggambarkan tentang keadaan wilayah yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan. Kondisi ekonomi, sosial dan politik di desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi salah satu penunjang pelaksanaan Program BSM atau justru menghambat pelaksanaan Program BSM. Pada model implementasi Van Matter dan Van Horn, menyatakan bahwa kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi karakter badan pelaksana dan sikap para pelaksana.

Kondisi sosial, ekonomi dan politik berpengaruh besar terhadap pelaksanaan program BSM ini. Kondisi sosial dapat dilihat ketika respon dan partisipasi dari wali murid dan siswa yang sangat antusias sekali agar anaknya terdaftar dalam program BSM. Kondisi ekonomi dapat dilihat dari kondisi pekerjaan (ekonomi) wali murid yang penghasilannya belum bisa untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, mengingat kebutuhan hidup semakin mahal, sehingga dengan adanya program BSM tersebut, siswa yang kurang mampu merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Tidak hanya itu saja, bisa dilihat juga bahwa kondisi politik juga dapat mempengaruhi program BSM. Hal ini terlihat ketika elite politik ditingkat desa sangat mendukung supaya anak-anak dapat melengkapi kebutuhan sekolahnya, sehingga pihak kelurahan tidak pernah mempersulit pengurusan kelengkapan persyaratan menerima BSM. Namun, ada sebagian wali murid yang melakukan kecurangan, yaitu dana BSM tidak dipakai untuk keperluan sekolah, melainkan dipakai untuk keperluan lain misalnya membeli peralatan rumah tangga.

PENUTUP

Simpulan

Standar Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan dan dijelaskan dalam hasil dan

pembahasan mengenai implementasi program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang dianalisis melalui teori yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn mengenai indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dapat disimpulkan dengan melihat disetiap indikator-indikatornya yaitu:

Pencapaian ukuran kebijakan program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo masih belum tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari ukuran atau target yang ingin dicapai masih belum memenuhi target seperti halnya dalam penetapan siswa penerima BSM yang belum tepat sasaran dan dana BSM tidak dipergunakan untuk keperluan sekolah. Namun untuk tujuan pelaksanaan BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sudah tercapai. Pada implementasi program BSM di SDN Candinegoro terdiri dari sumberdaya manusia, sumberdaya dana dan sumberdaya waktu. Sumberdaya manusia sudah mencukupi dan sudah kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Sumberdaya dana, dana BSM berasal dari APBN. Pada sumberdaya dana ini terdapat kendala yang dihadapi, yakni mengalami keterlambatan dana. Sumber daya waktu, dengan waktu yang telah ditargetkan untuk melaksanakan program BSM yaitu selama 3 bulan setelah batas waktu pencairan BSM. Jika siswa tidak mengambil uang selama 3 bulan maka uang tersebut akan dikembalikan ke kas negara, namun dalam pengambilan dana BSM, SDN Candinegoro tidak mengalami masalah.

karakteristik agen pelaksana pada implementasi program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sudah sepenuhnya menjalankan sesuai dengan tupoksi yang telah diberikan.

sikap atau kecenderungan (disposisi) para pelaksana pada pelaksanaan program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sangat mendukung adanya program BSM tersebut. dilihat dari respon para guru di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo cukup baik dalam melayani siswa dan orang tua siswa penerima BSM.

Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dalam pelaksanaan program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sudah melaksanakan komunikasi kepada murid ataupun wali murid melalui kegiatan sosialisasi. Namun dari pihak DISPENDIK/UPTD wonoayu melakukan komunikasi kepada sekolah SDN Candinegoro hanya melalui surat dan telepon, tidak ada komunikasi secara langsung sehingga mengharuskan para guru SDN Candinegoro mencari informasi sendiri mengenai program BSM.

kondisi sosial, ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi implementasi program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Lingkungan yang paling utama yang mempengaruhi pelaksanaan Program BSM ini yaitu lingkungan ekonomi karena perekonomian menyangkut keuangan. Dapat dilihat dari penghasilan wali murid yang tidak mencukupi, sedangkan lingkungan sosial dilihat ketika partisipasi dan respon dari wali murid dan siswa yang sangat antusias sekali agar anaknya terdaftar dalam program BSM. bisa dilihat juga bahwa kondisi politik

juga dapat mempengaruhi keberhasilan program BSM. Hal ini terlihat ketika elite politik ditingkat desa mendukung supaya anak kurang mampu dapat melengkapi kebutuhan sekolahnya, sehingga pihak kelurahan tidak mempersulit dalam pengurusan kelengkapan persyaratan menerima BSM, namun ada sebagian wali murid yang melakukan kecurangan yaitu wali murid yang tergolong mampu tetap ingin mendapat BSM, dan ada juga wali murid yang menyalahgunakan dana BSM untuk keperluan pribadi.

Saran

Dari hasil pemaparan mengenai Implementasi program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang dianalisis melalui teori yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn. Adapun saran-saran yang dapat ditawarkan sehingga program BSM ini nantinya dapat di implementasikan dengan lebih efektif lagi:

1. Untuk KEMENDIKBUD diharapkan mau berkoordinasi dengan Pemerintah daerah dan bank BRI dalam penyaluran dana agar tidak lagi terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana.
2. Meningkatkan kesadaran orang tua siswa agar tidak menyalahgunakan dana BSM sehingga dana BSM benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan sekolah.
3. Sebaiknya pihak sekolah memprioritaskan terlebih dahulu anak yang sesuai dengan kriteria dalam program BSM.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan dari buku

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia).
- Wahab, Solihin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahab, Abdul Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady A. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses kebijakan Publik)*. Sidoarjo: Banyumedia Publishing.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses kebijakan Publik)*. Sidoarjo: Banyumedia Publishing.

Subarsono.2005. *analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rujukan dari dokumen resmi pemerintah dan suatu lembaga

Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. No. 15 Tahun 1996 tentang Program Langit Biru.

Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/404.1.3.2/2012 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengatur Lalu Lintas Kegiatan Car Free Day di Kabupaten Sidoarjo tahun Anggaran 2012.

Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/17/404.1.3.2/2013 Tentang Segmen Jalan Sebagai Center Point Kegiatan Car Free Day di Kabupaten Sidoarjo tahun 2013.

Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/243/404.1.3.2/2013 Tentang Petugas Pengatur Lalu Lintas Kegiatan Car Free Day di Kabupaten Sidoarjo tahun 2013.

Surat Perintah Tugas Nomor: 800/695/404/3.6/2014 Tentang Pengaturan dan Pengalihan Arus Lalu Lintas Kegiatan car free day di Kabupaten Sidoarjo.

Rujukan dari internet

Berita Indonesia. 2013. Siswa Miskin Baru tersalur 24 persen. (<http://tribunnew.com>, di akses tanggal 25 Februari 2014)

Jawa Timur. 2013. bantuan siswa miskin. (<http://wikipedia.com>, di akses pada tanggal 24 Februari 2014).

Berita Jatim. 2013. pendidikan-kesehatan siswa miskin tak terima bsm. (<http://portaljatim.com>/diakses pada tanggal 16 April 2013)

Indonesia Jatim. 2013. Pengaruh BSM untuk siswa kurang mampu. (<http://digilib.jatim.ac.id>, di akses pada 25 Februari 2014).

Rujukan dari Peraturan Perundang-undangan/Pedoman Pelaksana

Republik Indonesia. 2012. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang Langkah-Langkah pengendalian belanja Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012

Tim sosialisasi penyesuaian subsidi bahan bakar minyak. 2013. Pegangan sosialisasi dan implementasi pogram-program kompensasi kebijakan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak. Jakarta

Pusat. Tim sosialisasi penyesuaian subsidi bahan bakar minyak

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin APBNP. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



UNESA

Universitas Negeri Surabaya